

Laporan KinerJa Instansi Pemerintah

TAHUN 2021



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kota Batam periode RPJMD 2016 – 2021 yaitu "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi". selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021.



Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021. Semoga (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Batam, Februari 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



Abd. Malik, S.E.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19660727 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	3
1.4.1 Kedudukan	3
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4.3 Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Tujuan.....	6
2.1.2 Sasaran	6
2.1.3 Strategi Dan Kebijakan	7
2.1.4 Program Dan Kegiatan	9
2.2 Penetapan Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
BAB IV PENUTUP.....	17
4.1 Kesimpulan.....	17
4.2 Saran	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Batam	vi
Tabel 2. 1	Keterkaitan (Interelasi) Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	7
Tabel 2. 2	Tabel Penetapan Kinerja	10
Tabel 3. 1	Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam	13
Tabel 3. 2	Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam..... 4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Walikota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan 6 (lima) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Batam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	100	100
	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100	100	100
Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100

Dari ilustrasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan Good Government, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam 2016-2021.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan berdasarkan permasalahan prosedur pelayanan masyarakat nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
3. Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

1.4 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

1.4.1 Kedudukan

Sesuai dengan peraturan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

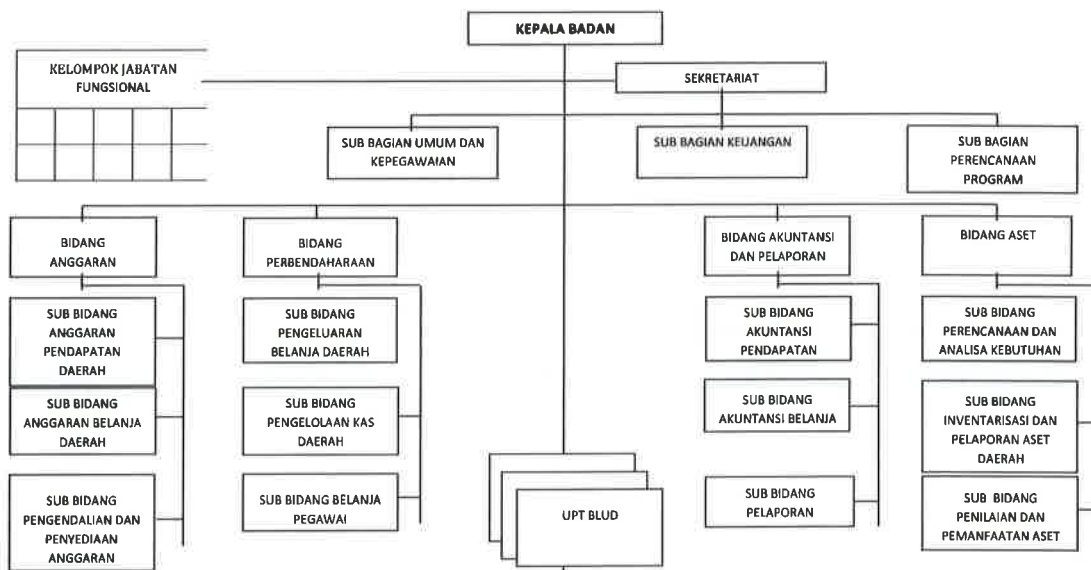
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dan memiliki 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset. Struktur Organisasi BPKAD Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2021 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kota Batam. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kota Batam.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
2. Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3. Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu;
4. Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;
5. Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;
6. Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.

Tabel 2. 1. Keterkaitan (Interelasi) Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam
	Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel; Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu; Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis aktual; Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah; Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK

2.1.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

Strategi:

Menerapkan tertibnya administrasi yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Kebijakan: Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sasaran 2 : Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;

Strategi:

Menerapkan sistem penyusunan, pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran

Kebijakan :

Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah

3. Sasaran 3 : Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu;

Strategi:

Menerapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kebijakan :

Meningkatkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Sasaran 4 : Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;

Strategi:

Menerapkan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kebijakan :

Meningkatkan pembinaan kepada OPD bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang tepat waktu

5. Sasaran 5 : Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;

Strategi:

Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

□ Kebijakan :

Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

6. Sasaran 6 : Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.

□ Strategi:

Menerapkan Pembinaan Perkuatan Permodalan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

□ Kebijakan :

Pemberian Pinjaman Permodalan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang Produktif serta layak dikembangkan

2.1.4 Program Dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun Anggaran 2021, melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melaksanakan 12 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD;
9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
10. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100
Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100
Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP

Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar Rp44.563.706.378 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 85 s/d 100	=	Sangat Berhasil
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 70 s/d < 85	=	Berhasil
<input type="checkbox"/> 55 s/d < 70	=	Cukup Berhasil
<input type="checkbox"/> 0 s/d < 55	=	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan Realisasi pencapaian Kinerja/Fisik (Keluaran) Program dan Kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun anggaran 2021 menjalankan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisa pengukuran tingkat capaian Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam Tahun 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2021			
		TARGET	REALISASI	%	NILAI
1	2	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase Hasil Temuan Pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Berhasil
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2021			
		TARGET	REALISASI	%	NILAI
1	2	4	5	6	7
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPED sesuai dengan aturan yang berlaku	WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	100%	Sangat Berhasil
	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu				
Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil
Keg. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	100%	Sangat Berhasil

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2021			
		TARGET	REALISASI	%	NILAI
1	2	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	100%	<i>Sangat Berhasil</i>
Keg. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat Berhasil</i>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menghasilkan nilai 100% atau bermakna Sangat Berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran Pagu Anggaran Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp. Rp44.563.706.378,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.211.471.763,21 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Koma Dua Puluh Satu Rupiah) atau 61,06% dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
	44.563.706.378,00	27.211.471.763,21	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.809.823.301,00	20.818.479.256,71	77,65%
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.543.271.566,00	14.829.172.801,00	95,41%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	840.750.000,00	549.580.000,00	65,37%
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	693.527.000,00	469.081.906,00	67,64%
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.160.239.000,00	1.995.520.710,00	92,37%
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	521.280.000,00	324.676.840,00	62,28%
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.999.927.200,00	1.312.067.839,71	65,61%
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.514.002,00	271.908.600,00	75,01%
Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	4.688.314.533,00	1.066.470.560,00	22,75%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.904.083.077,00	5.580.312.506,50	33,01%
Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.299.422.500,00	1.002.718.200,00	77,17%
Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	197.250.000,00	168.425.000,00	85,39%
Keg. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.407.410.577,00	4.409.169.306,50	28,62%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	849.800.000,00	812.680.000,00	95,63%
Keg. Pengelolaan Barang Milik Daerah	849.800.000,00	812.680.000,00	95,63%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh Pimpinan dan diharapkan masing-masing Bidang lebih fokus melaksanakan Program dan Keegiatannya agar sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) dapat tercapai.